

MEWUJUDKAN PENATAAN RUANG YANG BERTUMPU PADA KEMITRAAN

Oleh:

Ginandjar Kartasasmita

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas

Selaku Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional

**Disampaikan pada Seminar dan Kongres Nasional Ke V IAP
Jakarta, 10 Desember 1997**

Saya merasa berbahagia dapat memenuhi undangan IAP untuk memberikan Sambutan Pengarahan mengawali Seminar dan Kongres Nasional.

Tema penataan ruang yang bertumpu pada kemitraan sangat relevan dengan tuntutan dan perkembangan dewasa ini, dan di masa mendatang. Persoalan penataan ruang semakin rumit dan mempunyai dampak luas pada berbagai segi kehidupan masyarakat. Berbagai kepentingan dan tuntutan dalam penataan ruang dengan mudah dapat menyulut konflik-konflik yang lebih luas. Yang paling dituntut dalam penataan ruang adalah bagaimana cara yang efektif mempertemukan berbagai kepentingan tersebut sehingga tercapai tujuan bersama secara optimal. Mempertautkan penataan ruang dan kemitraan dapat dipandang sebagai upaya untuk mempertemukan berbagai kepentingan dan aspirasi dari semua pihak dan sekaligus mencegah potensi konflik antar-kepentingan yang dapat mengarah menjadi masalah yang lebih kompleks.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Tata-cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang memberikan arahan yang jelas mengenai konsep dan mekanisme penataan ruang.

Mekanisme penataan ruang telah diatur dengan mengangkat keterlibatan seluruh lapisan dan golongan di masyarakat. Penataan ruang merupakan upaya bersama yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk di dalamnya dunia usaha untuk secara bersama-sama mengembangkan upaya yang saling terkait dan saling menguntungkan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 masyarakat diberikan tempat sebagai pelaku utama penataan ruang yang mengacu pada arahan dan ketentuan penataan ruang yang baik. Mekanisme yang transparan dan keterbukaan informasi tata ruang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta membangun ruang yang berkualitas dan sekaligus dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Penataan ruang akan menguntungkan apabila didasarkan atas keterkaitan dan keseimbangan antarkepentingan pihak-pihak yang terlibat. Keterkaitan dan keseimbangan antarkepentingan ini yang menjadi dasar kemitraan dalam penataan ruang.

Kemitraan dalam penataan ruang akan semakin penting khususnya dalam era di mana potensi konflik antarkepentingan dalam penggunaan ruang akan semakin besar.

Kemitraan pada hakekatnya adalah keterkaitan yang seimbang dan sejajar serta kerja sama yang saling menguntungkan antara pelaku-pelaku yang terlibat untuk mencapai manfaat bersama. Dalam konsep kemitraan tidak dikenal adanya yang dikalahkan atau yang dirugikan, karena semua pihak akan mendapat manfaat sesuai dengan kepentingan masing-masing. Untuk itu perlu dipahami bagaimana mengalokasikan risiko-risiko sebaik-baiknya kepada mereka yang paling mampu mengelolanya.

Dalam upaya penataan ruang, terdapat hubungan-hubungan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, adanya hubungan antarwilayah. Penataan ruang pada hakekatnya adalah keseimbangan antara upaya pembangunan dan kelestarian yang memerlukan keterkaitan antarwilayah, khususnya antarfungsi-fungsi wilayah atau kawasan. Dalam konteks ini termasuk keterkaitan antarperdesaan dan perkotaan.

Kedua, adanya hubungan atau keterkaitan antarsektor. Penataan ruang merupakan kumpulan upaya pengembangan sektor-sektor yang harus diharmonisasikan satu dengan yang lain. Melalui keterkaitan antarsektor, diupayakan efisiensi dan efektifitas pengembangan sektor dalam penataan ruang.

Ketiga, adanya keterkaitan antarpelaku. Setiap pelaku baik pemerintah, masyarakat umum, masyarakat dunia usaha dan golongan masyarakat lainnya mempunyai kepentingan masing-masing dalam penataan ruang. Dengan ditumbuhkannya keterkaitan usaha antarpelaku, maka dapat dikembangkan manfaat bersama yang lebih besar dibandingkan apabila usaha-usaha tersebut dikembangkan secara individual.

Keempat, adanya keterkaitan antarupaya untuk mewujudkan penataan ruang yang lebih berkualitas. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka meningkat pula tuntutan akan pengaturan pemanfaatan ruang yang lebih baik, lebih nyaman untuk didiami dan untuk berusaha, lebih tertib dan lebih aman. Peningkatan kualitas ruang memerlukan upaya bersama antarsektor, antarwilayah atau kawasan serta antarpelaku.

Keempat dimensi keterkaitan dalam penataan ruang tadi perlu didukung oleh pola-pola kemitraan yang efektif.

Di sini terletak tantangan mendasar bagi profesi ahli perencanaan tata ruang, yaitu bagaimana mengembangkan pola-pola kemitraan antarwilayah, antarsektor dan antarpelaku pembangunan yang dapat meminimalkan konflik antarkepentingan. Kiranya para perencana perlu dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola konflik dan kehandalan untuk menyasikan berbagai kepentingan.

Sebagai penutup, saya sampaikan ucapan Selamat pada IAP dalam menyelenggarakan Seminar dan Kongres Nasional ke V ini. Semoga sukses.